

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 16

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna pengembangan potensi usaha Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu melakukan penguatan modal usaha pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah ... 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ... 4

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat PD Sindangkasih Multi Usaha adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha.
7. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program penyertaan modal kepada PD Sindangkasih Multi Usaha memiliki tujuan :
 - a. meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
 - b. memperkuat struktur permodalan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini adalah PD Sindangkasih Multi Usaha.

**BAB III
SUBJEK DAN OBJEK**

Pasal 3

- (1) Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah dan PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (2) Objek penyertaan modal adalah investasi dari Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha yang merupakan penyertaan modal.

**BAB IV
JENIS DAN BENTUK**

Pasal 4

- (1) Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha berupa uang yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka.
- (2) Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD Sindangkasih Multi Usaha merupakan investasi jangka panjang permanen.

**BAB V
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan modal dasar.
- (4) Pemenuhan modal dasar selanjutnya sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah memberikan sejumlah dana pada PD Sindangkasih Multi Usaha sebagai penyertaan modal.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab PD Sindangkasih Multi Usaha dalam penyertaan modal ini adalah mengelola dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Direksi PD Sindangkasih Multi Usaha wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit akuntan publik.
- (2) Bagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah yang dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenan atau Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) PD Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi sebagai bahan persetujuan Bupati yang mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomi.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi wajib menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi guna menjamin adanya kepastian usaha bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat Ringkasan Rencana Usaha, Uraian Produk yang dihasilkan, Analisa Persaingan, Analisa Pasar, Strategi Usaha, Analisa Financial serta dilampiri dokumen pendukung lainnya berupa profil usaha dan manajemen serta dokumen hukum.

Pasal 12

- (1) Permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan saran pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek potensi usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil PD Sindangkasih Multi Usaha serta pertimbangan kebijakan pemilik.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT **(16/372/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003